

## **Fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta**

**Silvi Octavia S<sup>(1)\*</sup>**

**(1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan  
Masyarakat Desa “APMD”**

Jalan Timoho No. 317 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55165, Indonesia

\*Correspondence Address: [silvyoctavia8590@gmail.com](mailto:silvyoctavia8590@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The District Social Welfare Personnel (TKSK) is one of the social social volunteers assigned by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia to the success of the Social Welfare Business (UKS). TKSK has three functions, namely as coordinator, administrator, and facilitator. These functions are intended to assist those in need of Social Welfare Services (PPKS) in this case Children with Disabilities. Of course, as a facilitator, TKSK must carry out its facilitation forms to support all efforts to organize social welfare. Therefore, this study was aimed at looking at the forms of facilitation carried out by TKSK on PPKS with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. In addition, this study uses data analysis techniques using the Miles and Huberman model (data collection, data reduction, data triangulation, data presentation, and conclusion drawing and verification). The results of this research show that the forms of facilitation carried out by TKSK as facilitators have been running optimally. It is proven that the PPKS of the Children with Disabilities group feels a significant influence with the facilitation carried out by TKSK, especially in the implementation of Social Welfare Enterprises (UKS) at Kemantren Umbulharjo so that PPKS can carry out their social functions properly and optimally.*

**Keywords:** TKSK; PPKS; Social Welfare Efforts; Forms of Facilitation.

### **ABSTRAK**

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan salah satu relawan sosial sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial RI untuk mensukseskan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). TKSK mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai koordinator, administrator, dan fasilitator. Fungsi-fungsi ini ditujukan untuk mendampingi para

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Tentu sebagai fasilitator tentu TKSK harus menjalankan bentuk-bentuk fasilitasnya guna mendukung segala usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk melihat bentuk-bentuk fasilitasi yang dilakukan TKSK pada PPKS dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (pengumpulan data, reduksi data, triangulasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi). Hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa bentuk fasilitasi yang dilakukan TKSK selaku fasilitator sudah berjalan optimal. Hal ini terbukti bahwa PPKS merasakan pengaruh yang signifikan dengan adanya fasilitasi yang dilakukan TKSK terkhusus dalam penyelenggaraan UKS di Kemantren Umbulharjo sehingga PPKS dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan optimal.

**Kata Kunci:** TKSK; PPKS; Usaha Kesejahteraan Sosial; Bentuk Fasilitasi.

**INFORMASI ARTIKEL:**

Diterima : 11 Agustus 2022  
Direview : 22 Agustus 2022  
Diterbitkan : 30 Agustus 2022

## **PENDAHULUAN**

Kesejahteraan sosial merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan suatu instansi atau organisasi baik tingkat daerah maupun tingkat nasional dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Kesejahteraan sosial kerap kali bersinggung dengan isu ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, terlebih pada isu kemiskinan. (Yunus, 2021), salah satu masalah terbesar yang dihadapi negara berkembang adalah kemiskinan, di mana distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan ketimpangan pendapatan, tentu hal ini menjadi awal dari munculnya masalah kemiskinan, salah satunya adalah Indonesia. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2021, terdapat 26,50 juta penduduk miskin di Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi. Sementara itu, tinjauan data melalui (Badan Pusat Statistik DIY, 2020), garis kemiskinan di DIY sebesar Rp 465.428 per kapita per bulan, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 503,14 ribu orang.

Jika dikaji dari data tersebut, pemerintah tentu telah mengupayakan berbagai program pengentasan kemiskinan di tanah air, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan lain sebagainya. Adapun alasan utama pemerintah menyusun rangkaian program tersebut tidak lain dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan di tanah air. Namun pada dasarnya, tercapainya kesejahteraan sosial bukan serta merta menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga tugas bersama antara pemerintah dengan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan "Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

## **Fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta**

dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial” (Pemerintah Indonesia, 2009).

Guna mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kontinu dan berdampak nyata, tentu dibutuhkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat menjadi TKSK merupakan salah satu relawan sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat, di mana TKSK menjadi SDM yang disiapkan oleh Kementerian Sosial untuk mensukseskan penyelenggaraan dan pelayanan kesejahteraan sosial. Hadirnya TKSK sama pentingnya dengan pekerja sosial profesional lainnya, yaitu sebagai relawan sosial TKSK berperan sebagai pendamping sosial dan pilar perlibatan masyarakat untuk aktif terlibat secara langsung dalam usaha kesejahteraan sosial serta menyalurkan segala aspirasi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Koordinasi tugas TKSK diawali oleh Kementerian Sosial, dilanjut Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, terakhir dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan (Yefni, Akbar, & Rahayu 2021).

Hakikatnya, penugasan yang diberikan oleh TKSK merupakan salah satu bentuk tugas fungsional dengan tugas, pokok, dan fungsi yang diatur oleh pihak Kementerian Sosial. Berdasarkan Teori Stuktural Fungsional yang dikenalkan oleh Talcott Parson dalam buku “Seri Teori-Teori Sosial Indonesia” yang ditulis oleh (Nasiwan & Wahyuni, 2016), menjelaskan bahwa setiap elemen masyarakat bekerja dalam sistem yang bertingkat dan semuanya berfungsi sesuai dengan kebutuhan sistem sosial. Tentu, dalam mencapai tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dibentuknya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memiliki fungsi khusus dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Adapun fungsi TKSK yaitu sebagai koordinator, administrator, dan fasilitator. Di sisi lain, TKSK juga berperan mendampingi kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya akan disingkat menjadi PPKS. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah mereka yang menghadapi kendala dalam melaksanakan fungsi sosialnya sehingga mereka tidak dapat memenuhi esensi kehidupan. Kelompok ini mencakup komunitas marginal, misal anak terlantar, orang dalam disabilitas, fakir miskin, dan sebagainya (Habibullah, 2020).

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada 23 Maret 2022, dengan Pak Sofwan yang merupakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kemantren Umbulharjo. Diketahui bahwa Kemantren Umbulharjo merupakan kemantren (pengganti sebutan “kecamatan” sesuai dengan nomenklatur D.I Yogyakarta) terbesar dari 14 kemantren di Kota Yogyakarta dengan luas wilayah ±811.4800 Ha dan populasi penduduk sebanyak 70.829 (data tahun 2021). Selain menjadi kemantren terluas di Kota Yogyakarta, kemantren ini memiliki jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak sedikit.

Melalui observasi ini, ditemukan jumlah kelompok PPKS di tujuh kelurahan tahun 2021 sejumlah 636 jiwa. Bersumber pada data dilihat bahwa PPKS urutan tiga

terbesar yaitu kelompok difabel dengan total 257 jiwa, diikuti jumlah kedua terbesar yaitu lanjut usia sejumlah 110 orang, dan kemudian diurutkan ketiga adalah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (disebut PRSE). Situasi ini pasti menyulitkan TKSK untuk melakukan pendampingan dan pendataan, mengingat ruang kerja TKSK sangat luas yaitu satu kecamatan. TKSK jelas menghadapi banyak kendala teknis dan non-teknis dalam menjalankan tugasnya. Bahkan jika melihat remunerasi yang diterima, itu jauh dikatakan layak berdasarkan tuntutan tugas dan tanggung jawabnya. Maka tidak diragukan lagi, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi TKSK selaku relawan sosial dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk memotret bagaimana bentuk fasilitasi yang dilaksanakan atau diterapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kehidupan sejahtera. Adapun bentuk fasilitasi yang dimaksud meliputi pendampingan sosial, bimbingan sosial, dan kemitraan (Ayal, 2015).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta dengan subjek penelitian adalah TKSK, PPKS, dan stakeholder terkait. Adapun objek penelitian ini adalah bentuk fasilitasi yang dilaksanakan TKSK pada kelompok PPKS guna mewujudkan kehidupan sejahtera dengan 3 (tiga) fokus penelitian yaitu 1) Bentuk fasilitasi TKSK dalam melakukan pendampingan sosial kepada kelompok PPKS, 2) Bentuk fasilitasi TKSK dalam melakukan bimbingan sosial kepada kelompok PPKS, 3) Bentuk fasilitasi TKSK dalam memfasilitasi jejaring kemitraan kepada kelompok PPKS.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang dimulai dengan pengumpulan data yang dilakukan secara teliti dan mendalam agar mendalam agar data yang bersifat akurat, selanjutnya reduksi data yang memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data-data berikutnya hingga pada tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data ini, peneliti melakukan pemilahan data dari informan yang didapatkan pada saat wawancara seperti memilih data informan, tanggal dilaksanakan wawancara dan lokasi penelitian. Kemudian hasil wawancara tersebut akan dipilah hal-hal yang penting dan sesuai dengan topik penelitian yang dilaksanakan. Reduksi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sementara, lalu dipastikan dengan triangulasi data yang menggunakan metode memeriksa keakuratan data atau informasi dari pandangan yang berbeda tentang apa yang

peneliti lakukan, langkahnya dengan mengurangi sebanyak mungkin makna ganda saat menganalisis data.

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber data untuk mengecek kelengkapan data serta memastikan bahwa datanya valid. Triangulasi dilakukan untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan informasi antara satu subjek dengan subjek lainnya melalui observasi langsung dan wawancara, sehingga diperoleh kebenaran data yang handal, benar, dan tidak diragukan lagi, kemudian dilakukan penyajian data yang dilakukan dalam bentuk teks dan naratif di mana penyajian data ini sebelumnya telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

Peneliti menyajikan data berupa narasi tentang bentuk-bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam mewujudkan kehidupan sejahtera, Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi di mana tahap ini merupakan akhir dari semua data yang telah didapatkan dengan melihat metode-metode yang telah dilakukan dan mengacu pada rumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang dilakukan. Sehingga kesimpulan akhir yang didapatkan dapat menjawab rumusan masalah yang ada dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat terjawab secara keseluruhan dan bersifat valid.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kesejahteraan sosial merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan suatu instansi atau organisasi baik tingkat daerah maupun tingkat nasional dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Guna mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kontinu dan berdampak nyata, tentu dibutuhkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat menjadi TKSK merupakan salah satu relawan sosial di mana TKSK menjadi SDM yang disiapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mensukseskan penyelenggaraan dan pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut dengan UKS). Pada dasarnya, kehadiran TKSK dalam pelaksanaan upaya kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan pekerja sosial profesional lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan “Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan”.

Pembentukan TKSK mencakup fungsi-fungsinya sebagai relawan sosial yakni sebagai koordinator, fasilitator, dan administrator. Selaku fasilitator TKSK berfungsi sebagai fasilitasi, di mana TKSK membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Fasilitasi yang dimaksud ialah memudahkan atau melayani serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Wujud fasilitasi yang dilakukan oleh TKSK

berupa pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan, dan juga rujukan. Fasilitasi yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ditujukan untuk kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mana di dalamnya terdapat elemen individu, kelompok, keluarga, dan/atau masyarakat yang memiliki hambatan dalam pencapaian fungsi sosialnya, sehingga diperlukan tindakan untuk membantu dan menanggulangi segala permasalahan yang dihadapinya.

Oleh sebab itu, fasilitasi yang dilakukan TKSK tentu dapat membantu para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera, khususnya di wilayah Kemantren Umbulharjo. Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta adalah salah satu Kemantren dari 14 Kemantren di Kota Yogyakarta yang terletak di sisi selatan Kota Yogyakarta dengan ketinggian dari permukaan laut  $\pm 113$  mdpl dan luas wilayah sebesar  $\pm 811,4800$  Ha serta jumlah penduduk sebanyak 69.139 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki berjumlah 69.139 dan perempuan sebanyak 33.940 jiwa. Dari keseluruhan total penduduk tersebut terdapat 636 jiwa kelompok PPKS dengan jenis berbeda. Oleh karena itu, peneliti menggali informasi kepada informan dengan cara mewawancarai secara langsung untuk mengetahui bagaimana bentuk fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam mewujudkan kehidupan sejahtera. Pada prosesnya peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi di Kemantren Umbulharjo yang hasilnya kemudian disusun secara tertata dan sistematis oleh peneliti. Sajian data dapat dilihat sebagai berikut:

**a) Bentuk fasilitasi TKSK dalam melakukan pendampingan sosial kepada kelompok PPKS**

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang difasilitasi oleh pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan. Sementara itu, pendampingan sosial adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial yang ada. Hakikatnya, pendamping sosial mempunyai tugas pokok memfasilitasi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dalam mengatasi dan memecahkan masalah tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Oleh sebab itu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kemantren Umbulharjo menggunakan bentuk-bentuk pendampingan yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat disekitarnya. Bentuk pendampingan yang dilakukan antara lain: **Pertama**, melalui bentuk *top down* yaitu pendampingan dengan memberikan pelayanan dan fasilitas kepada kelompok sasaran melalui kebijakan dan keputusan langsung dari pusat. **Kedua**, melalui bentuk *button up* yaitu bentuk

pendampingan yang bertumpu pada partisipasi dan kontribusi masyarakat untuk mengembangkan dan menjalankan program-program dalam rangka penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial. **Ketiga**, pendampingan sosial melalui bentuk kerjasama atau kemitraan yang melibatkan berbagai institusi terkait baik dari pemerintah maupun *stakeholder* yang terlibat dari pencapaian penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, khususnya di Kemantren Umbulharjo.

Pada dasarnya, pendampingan sosial yang dilakukan oleh TKSK merupakan salah satu bentuk fasilitasi TKSK pada kelompok PPKS dengan memberikan fasilitas pendampingan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu/kelompok sasaran. Berlangsungnya pendampingan sosial ini tidak terlepas dari kontribusi dan dukungan oleh para stakeholder terkait yakni pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan pihak Kemantren Umbulharjo. Dengan demikian, sasaran program penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, di mana yang dimaksud adalah kelompok PPKS merasakan pengaruh yang sangat signifikan bagi keberlangsungan hidupnya. Para PPKS dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik dan menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat secara maksimal.

#### **b) Bentuk fasilitasi TKSK dalam bimbingan sosial kepada PPKS**

Bimbingan merupakan seluruh program atau kegiatan dalam lembaga atau institusi pendidikan yang diarahkan untuk membantu individu, kelompok, masyarakat agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Bimbingan yang diberikan kepada klien agar ia mampu mengenali dirinya dengan potensi yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan untuk memahami lingkungan sekitarnya dan dapat menyesuaikan diri dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, bimbingan sosial (*social guidance*) merupakan bentuk bimbingan yang berhubungan langsung dengan masalah sosial.

Oleh sebab itu, pelaksanaan bimbingan sosial dilakukan untuk membantu individu/masyarakat dalam mencegah atau mengatasi masalah-masalah sosialnya sehingga sasaran kelompok tersebut dapat menjalankan fungsi sosialnya secara maksimal dan optimal sesuai dengan kemampuannya. Dalam bimbingan sosial yang dilakukan TKSK di Kemantren Umbulharjo, pelaksanaan bimbingan diawali dengan analisis pemenuhan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan selanjutnya tindak lanjut. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah data data yang didapat. Selanjutnya, analisis perencanaan yang kemudian direalisasikan pada tahap pelaksanaan dengan memperhatikan tingkat pendapatan, tingkat satuan pendidikan, kebutuhan kelompok sasaran, dan lain-lain. Oleh sebab itu, melalui informasi yang disampaikan oleh para subjek penelitian dapat ditarik benang merah bahwasanya pelaksanaan bimbingan sosial sejauh ini berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian-pencapaian yang

diperoleh oleh TKSK dan kesesuaian dengan kebutuhan individu dan/atau kelompok sasaran, dalam hal ini adalah para PPKS.

Meskipun dalam menjalankan tugasnya TKSK kerap kali menghadapi berbagai hambatan, tetapi hal tersebut mampu diatasi sehingga pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah berlaku. Namun dengan demikian, keberhasilan dari berlangsungnya proses bimbingan sosial yang dilakukan oleh TKSK tentu tidak terlepas dari bantuan serta dukungan pihak lain. Keterlibatan mitra program dan para stakeholder membantu TKSK dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya. Selain itu, adanya kontribusi dari segala pihak dan antusias dari kelompok PPKS untuk mengikuti bimbingan sosial sangat memberi pengaruh yang sangat baik bagi tercapainya tujuan diadakannya program bimbingan sosial ini terutama dalam pencapaian penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial di Kemantren Umbulharjo. Oleh sebab itu, dengan adanya bimbingan sosial ini membawa pengaruh bagi kelompok sasaran untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mengembalikan fungsi sosialnya dengan baik dan maksimal.

**c) Bentuk fasilitasi TKSK dalam memfasilitasi jejaring kemitraan kepada kelompok PPKS guna mewujudkan kehidupan sejahtera**

Kemitraan atau *partnership* adalah suatu jenis ikatan hubungan yang terdapat sebuah perjanjian formal yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang dibuat dan juga disepakati untuk bisa menjadi rekan, saling melakukan sebuah program dengan tanggung jawab untuk menjalankan organisasi dengan berbagai keadaan yang terjadi di dalamnya. Prinsip kemitraan yang dimaksud meliputi; saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Hal ini karena secara umum, kemitraan adalah sebuah bentuk hubungan yang dijalin antara dua atau lebih orang ataupun institusi yang sudah menerima untuk bisa saling berbagi keuntungan yang diperoleh di bawah pengawasan seluruh anggota ataupun kemitraan lainnya.

Dalam hal ini selaku fasilitator, seorang TKSK juga menjadi aktor penting dalam menjalin kemitraan dengan *stakeholder* atau mitra wilayah lainnya yang terkait usaha kesejahteraan sosial di Kemantren Umbulharjo. Kemitraan ini terbentuk untuk membantu para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar dapat mengembangkan potensi yang ada di dirinya dan dapat berkontribusi dalam kegiatan penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial. Kemitraan yang dijalin oleh TKSK dapat membantu TKSK menjalankan tugasnya dilingkup wilayah yang lebih kecil. Pada dasarnya, dengan melibatkan lebih banyak mitra, artinya akan muncul ide-ide yang bisa diterapkan pada penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial dan semua tugas serta tanggung jawab dapat dibagi sesuai dengan kebutuhan. Pada intinya, dengan kemitraan yang dijalin oleh TKSK Kemantren Umbulharjo ini akan tersedia SDM yang cukup dan berperan dalam



mengembangkan dan menjalankan segala kegiatan terkhusus pada usaha kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

Pada dasarnya, bentuk fasilitasi yang dilakukan TKSK dalam bentuk kemitraan memberikan kemudahan bagi para PPKS dalam menangkau akses pelayanan kesejahteraannya, sehingga adanya jejaring kemitraan ini PPKS dapat dengan mudah menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Selain itu, dengan adanya jejaring kemitraan tentu membawa pengaruh yang sangat baik bagi TKSK dan PPKS bahkan dengan kemitraan yang jalin oleh TKSK. Di mana kemitraan yang dijalin dalam pelaksanaan berbagai program sebagian besar bersifat kemitraan umum. Kemitraan umum ini mengandung hak dan tanggung jawab yang dibagi sama rata dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan oleh setiap mitra. Pada dasarnya, kemitraan yang dilakukan membawa pengaruh yang sangat baik kepada kelompok sasaran, sehingga individu/kelompok PPKS dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan maksimal dan mampu mewujudkan kehidupan sejahtera sebagai salah satu tolak ukur kesuksesan penyelenggaran UKS.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kesejahteraan sosial merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan suatu instansi atau organisasi baik tingkat daerah maupun tingkat nasional dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya terutama dalam menuju kehidupan sejahtera. Kehidupan sejahtera adalah keadaan di mana masyarakat yang ada dapat menikmati memakmuran secara utuh, mampu melakukan fungsi sosialnya dengan baik, mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara maksimal, serta kemampuan untuk mengakses segala bentuk fasilitas dan pelayanan yang telah disediakan. Oleh sebab itu, kesuksesan penanganan masyarakat dengan masalah kesejahteraan sosial sangat ditentukan oleh kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya adalah kesiapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau biasa disebut dengan TKSK.

Bentuk fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam mewujudkan kehidupan sejahtera di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta yakni sebagai pendamping sosial. Selaku pendamping sosial, TKSK melakukan tugasnya secara baik dan sesuai dengan ketetapan yang ada. Bentuk pendampingan yang dilakukan oleh TKSK terbagi menjadi tiga yakni *top down*, *bottom up*, dan pendampingan yang bersifat kemitraan. Maka adanya pendampingan yang diarahkan serta ditujukan oleh kelompok PPKS membawa dampak dan perubahan untuk membantu mengembangkan dirinya serta potensi yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kehidupan sejahtera di lingkungan sekitarnya.

Kemudian sebagai fasilitator, TKSK melakukan tugasnya dengan melakukan pembimbingan kepada individu dan/atau kelompok PPKS dengan berbagai jenis PPKS.

Bimbingan sosial yang dilakukan berjalan secara tersruktur dan terarah dengan menjalin mitra oleh PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial). Bimbingan sosial yang dilakukan oleh TKSK tidak hanya berhenti ditahap pelaksanaan melainkan sampai tahap pelaporan dan evaluasi serta tindak lanjut. Walaupun pada kenyataannya, dalam melaksanakan bimbingan sosial, TKSK kerap menghadapi hambatan. Oleh karena itu, TKSK berupaya menjalin kemitraan dengan PPKS agar program berjalan secara optimal. Kemitraan yang dijalin oleh TKSK di Kemantren Umbulharjo adalah kemitraan yang bersifat umum dimana kemitraan yang mengandung hak serta tanggung jawab yang dibagi sama rata dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Adanya jejaring kemitraan yang dilakukan oleh TKSK memberikan dampak positif, baik untuk TKSK maupun untuk PPKS. Terlaksananya segala tugas dan tanggung jawab TKSK tentu karena adanya jalinan kemitraan oleh stakeholder dan para lembaga lainnya di lingkup kelurahan dan kecamatan.

### **Saran**

1. Pemerintah sebaiknya memberikan perhatian lebih dalam pemberian upah jasa yang diterima oleh TKSK. Hal ini karena upah jasa yang diterima TKSK tidak sebanding dengan cakupan wilayah kerja dan tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh TKSK selaku mitra dinas sosial dan relawan sosial yang ada di wilayah kecamatan.
2. Adanya upaya peningkatan sinergitas organisasi atau mitra program baik ditingkat kelurahan, kecamatan, daerah, dan bahkan pusat agar tujuan penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial dapat terwujud dan berjalan secara optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.
3. Perlu adanya program yang dapat menarik perhatian kaum *millenial* untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial. Sehingga dengan adanya ketertarikan dari generasi muda, maka mendorong keberhasilan UKS dan mampu menciptakan lingkungan yang inklusi serta kehidupan sejahtera bagi para PPKS.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfansyur, A, and Mariyani. 2020. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5 (2): 146–50.
- Ayal, L. 2015. "Peran Pendamping Sosial Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin: Studi Pada Pendamping Kube FM di Kota Banjarmasin." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 39 (1): 43–53.
- Badan Pusat Statistik DIY. 2020. *Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta*. DIY: Badan Pusat Statistik DIY.

**Fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta**

- Badan Pusat Statistik. 2021. *Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Firdauz, E, and E Widodo. 2018. "Pengelompokan Data PMKS Menggunakan Metode *Self Organizing Maps*." *Sosiohumaniora* 4 (1).
- Habibullah. 2020. "Peran Pusat Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Sosial Terintegratif." *Sosio Konsepsia* 9 (3): 295–306.
- Nasiwan, and Y Wahyuni. 2016. *Seri Teori-Teori Sosial Indonesia*. Pertama. Yogyakarta: UNY Press.
- Pemerintah Indonesia. 2009. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial ." In *Lembaran Negara RI No 12 Tahun 2009*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Pertiwi, M. 2020. "Peran dan Fungsi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Sudimara Jaya." *Skripsi*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Prastyowati, S, and T Raharjo. 2016. "Kinerja TKSK dalam Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 40 (December): 227–42.
- Sabarisman, M. 2019. "Peran Pendamping Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan." *Sosio Informa* 5 (2): 145–61.
- Yefni, Y Akbar, and P Rahayu. 2021. "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK ) pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat* 6 (2): 70–92.
- Yunus, Y. 2021. "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Mendampingi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo." *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Ilmu Sosial (Publicio)* 3 (1): 62–70.

**Fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta**